

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca perang dunia ke-2, Jepang mengalami keterpurukan yang luar biasa dan keterbatasan peran dalam dunia Internasional akibat kalah dalam perang. Dalam rangka meningkatkan perdamaian global serta upaya Jepang untuk kembali ke komunitas Internasional, Jepang harus menandatangani perjanjian damai San Francisco 1951 dengan Sekutu. Namun berdasarkan perjanjian tersebut, Jepang diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada 12 negara yang ada di Asia Timur dalam bentuk dana kompensasi akibat kerusakan yang ditimbulkan Jepang dan Sekutu selama Perang Dunia ke-2 (Akiko, 2000).

Bantuan asing pertama Jepang ke negara-negara berkembang diberikan dalam bentuk bantuan multilateral melalui partisipasinya dalam Rencana Kolombo untuk Koperasi Pembangunan Ekonomi dan Sosial di Asia Pasifik pada bulan Oktober 1954. Rencana Kolombo awalnya diluncurkan pada tahun 1950 di Kolombo, Ceylon (sekarang Sri Lanka) untuk memfasilitasi kerjasama ekonomi dan teknis di antara negara-negara anggota Persemakmuran Inggris. Pada bulan Februari 1957, Perdana Menteri Kishi menguraikan filosofi Jepang bantuan asing dalam pidato kebijakan luar negerinya sebagai berikut, “Pertama-tama, bantuan Jepang ke negara-negara Asia yang berada di tengah-tengah pembangunan bangsa mereka masing-masing akan meningkatkan kesejahteraan nasional mereka. Kedua, reparasi dan kerja sama ekonomi terhadap negara-negara ini pada akhirnya akan mengamankan pasar ekspor baru untuk industri Jepang dan pada akhirnya akan berkontribusi pada ekonomi Jepang.” Jadi, pada saat itu pemberian bantuan dijelaskan sebagai kompensasi perang,

membayar hutang melalui rekonstruksi pascaperang dan promosi ekspor.

Pada tahun 1960, Organisasi Kerjasama Ekonomi Eropa (OEEC) membentuk Kelompok Bantuan Pembangunan (DAG) sebagai pertemuan ad hoc untuk mengoordinasikan pemberian bantuan oleh negara-negara donor. Pada tahun 1961 OEEC berganti menjadi Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), dan DAG dibentuk kembali sebagai organ berdiri Komite Bantuan Pembangunan (DAC) yang bertugas untuk memperkenalkan konsep *Official Development Assistance* (ODA). Pada tahun 1964 Jepang bergabung ke OECD. Anggota menerima Jepang tidak hanya untuk mendorong bantuannya tetapi juga untuk mendorong liberalisasi perdagangannya sesuai dengan kode dan aturan OECD yang Jepang lakukan. DAC telah mempengaruhi pembuatan kebijakan ODA Jepang sejak awal. Jepang telah bercita-cita menjadi pendonor yang berkinerja baik dan telah berjuang untuk menyelaraskan kebijakan bantuannya sebanyak mungkin dengan peraturan dan norma yang disepakati DAC (Akiko, 2000).

Semakin majunya ilmu pengetahuan akibat pengaruh globalisasi telah membuat isu keamanan dalam hubungan internasional semakin berkembang, yang awalnya didominasi oleh kaum tradisional dengan menyatakan bahwa isu keamanan dalam hubungan internasional hanya terbatas pada hubungan perang dan ancaman nuklir saja, namun seiring berjalannya waktu isu keamanan dalam hubungan internasional berubah menjadi isu kontemporer yang tidak hanya membahas hubungan perang antar negara saja namun juga sampai keberbagai sektor dengan aktor-aktor hubungan internasional yang semakin dinamis. Isu keamanan dalam suatu negara tidak hanya terbatas pada keamanan negara saja namun juga penting untuk mengamati keamanan yang dialami warga negaranya dalam pemenuhan hak-hak dasar sebagai individu.

Pergesaran isu keamanan dari keamanan tradisional ke non-tradisional (kontemporer) telah membuat *Human Security* juga ikut berkembang, salah satunya melalui pemikiran Mahbub ul-Haq yang meluncurkan Laporan Pembangunan Manusia di PBB tahun 1990. Dalam laporannya, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) berpendapat bahwa pembangunan harus difokuskan pada orang-orang (meskipun dikelompokkan berdasarkan negara) daripada keamanan batas-batas nasional mereka, dan memajukan kesehatan, pendidikan, dan kebebasan politik di samping kesejahteraan ekonomi (King & Murray, *Rethinking Human Security*, 2001). Konsep keamanan dengan demikian harus berubah dengan segera dalam dua cara dasar. *Pertama* dari tekanan eksklusif pada keamanan teritorial ke tekanan yang jauh lebih besar terhadap keamanan rakyat. *Kedua* dari keamanan melalui persenjataan hingga keamanan melalui pengembangan manusia yang berkelanjutan. UNDP dalam *Human Development Report 1994* mengkategorikan isu keamanan manusia kedalam tujuh bidang yaitu ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, komunitas dan politik. Menurut UNDP, keamanan ekonomi merupakan kondisi yang mengharuskan pemasukan tetap layak untuk setiap orang. Keamanan ekonomi membutuhkan penghasilan dasar yang terjamin biasanya dari kegiatan produktif dan pekerjaan yang menguntungkan, atau dalam upaya terakhir dari beberapa jaring pengaman yang dibiayai publik. Tapi hanya sekitar seperempat penduduk dunia yang pada saat ini aman secara ekonomi pengertian ini. Sementara masalah keamanan ekonomi di negara berkembang lebih mengkhawatirkan dibanding negara maju (UNDP, 1994).

Tidak lama setelah UNDP memperkenalkan konsep keamanan manusia pada tahun 1994, pemerintah Jepang pertama kali juga turut serta memperkenalkan keamanan manusia melalui pidato Perdana Menteri Murayama di PBB pada Oktober 1995. Konsep "keamanan manusia" yang diperkenalkan oleh UNDP di adopsi oleh pemerintah Jepang sebagai pilar diplomasi negaranya, dan hari ini Jepang telah menjadi pendukung keamanan manusia di komunitas

internasional. Selain itu, pemerintah Jepang telah mengembangkan kebijakan konkret tentang keamanan manusia di dalam program *Official Development Assistance* (ODA) negaranya. Jepang menganggap konsep ini sebagai landasan teoritis yang mengaitkan keamanan dengan bantuan pembangunan dan sarana upaya pembangunan perdamaian di wilayah konflik (Nasukawa, 2017, pp. 73-74).

Pada saat piagam *Official Development Assistance* (ODA) Kementerian Luar Negeri Jepang direvisi tahun 2003 untuk memenuhi tujuan pembangunan yang baru, keamanan manusia ditegakkan sebagai kebijakan dasar, namun definisi keamanan manusia pada saat itu tidak disebutkan. Dalam mengatasi ancaman langsung kepada individu seperti konflik, bencana dan penyakit menular, penting untuk tidak hanya mempertimbangkan perspektif global, regional, dan nasional, tetapi juga mempertimbangkan perspektif keamanan manusia, yang berfokus pada individu. Dengan demikian, Jepang akan menerapkan ODA untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal melalui pengembangan sumber daya manusia. Untuk memastikan bahwa martabat manusia dipertahankan di semua tahap, dari tahap konflik sampai tahap rekonstruksi dan pembangunan sehingga Jepang akan memperluas bantuan untuk perlindungan dan pemberdayaan individu (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2003).

Pada Februari 2005, kebijakan jangka menengah ODA baru dirumuskan, isinya tentang metode konkrit untuk menerapkan ODA kepada sasaran yang akan ditunjukkan. Kebijakan jangka menengah menyatakan bahwa keamanan manusia berfokus pada individu dan membangun masyarakat di mana setiap orang dapat hidup bermartabat dengan melindungi serta memberdayakan individu dan masyarakat yang terpapar dengan ancaman aktual atau potensial. Selanjutnya, dalam rangka untuk mengurangi kerentanan yang dihadapi oleh orang, masyarakat dan negara, kebijakan jangka menengah menyatakan bahwa Jepang akan mengatasi empat isu prioritas yaitu “pengentasan kemiskinan,” “pertumbuhan

berkelanjutan,” “mengatasi masalah-masalah global (masalah sumber daya, populasi, infeksi penyakit, makanan, narkoba, terorisme, kejahatan internasional, lingkungan, dll)” dan “pembangunan perdamaian,” dimana dari empat isu prioritas tersebut termasuk kedalam isu keamanan manusia (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2005).

Pada dasarnya *Official Development Assistance* (ODA) yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang diberikan melalui tiga jenis bantuan, yaitu berupa pinjaman YEN, bantuan hibah dan kerjasama teknik. Namun dalam penelitian ini hanya akan difokuskan pada skema bantuan hibah saja yang salah satu turunannya diperuntukkan bagi proyek khusus dalam menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. Bantuan hibah yang menjadi fokus penelitian ini bernama “*Grant Assistance for Grassroots Human Security Project*” atau yang biasa disingkat dengan kata GGP. GGP pertama kali diperkenalkan oleh Pemerintah Jepang pada tahun 1989 untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosio-ekonomi di negara-negara berkembang.

GGP memberikan bantuan keuangan dalam bentuk hibah dana yang tidak wajib dikembalikan oleh lembaga penerima (LSM, organisasi berbasis komunitas, rumah sakit, sekolah, dan asosiasi nonprofit lainnya) untuk membantu melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang mereka usulkan. Ketersediaan pendanaan GGP di negara berkembang telah menghasilkan skema bantuan luar negeri dari Jepang dengan cara kerja sama baru yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput (lapisan masyarakat paling bawah). Sepanjang berjalannya, bantuan ini telah memperoleh citra yang positif dimata masyarakat karena sifatnya yang fleksibel dan tepat waktu sehingga dinilai telah tepat sasaran terhadap proyek-proyek pembangunan pada tingkat akar rumput.

Secara umum skema Bantuan Hibah untuk Proyek Akar Rumput (GGP) dari Pemerintah Jepang dapat dikategorikan ke

dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (CEP) yang merupakan bagian dari skema kerjasama Japan International Cooperation Agency (JICA). Bantuan ini menargetkan masyarakat di tingkat akar rumput secara langsung melalui kerja sama dengan organisasi non pemerintah (NGO atau Lembaga nirlaba lainnya) berdasarkan persetujuan pemerintah penerima. JICA pertama kali memperkenalkan skema GGP pada tahun 1997 sebagai bagian dari dukungan untuk Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi darurat pada saat itu sesuai dengan meningkatnya peran NGO sebagai salah satu aktor pembangunan penting di Indonesia, dikarenakan NGO lebih mengentahui permasalahan akar rumput di tiap daerah yang menjadi basis mereka.

Menurut situs resmi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, total pemberian bantuan Jepang kepada Indonesia dari pertama kali sampai tahun 2006 secara kumulatif berjumlah 29.5 miliar USD. Oleh karena itu, Indonesia merupakan salah satu negara penerima bantuan terbesar dari Jepang, demikian juga sebaliknya, Jepang merupakan salah satu negara pemberi bantuan terbesar bagi Indonesia. Jadi, atas dasar inilah salah satu alasan Indonesia dan Jepang memperat hubungannya setelah lebih dari setengah abad menjalin hubungan diplomatik.

Sebenarnya bantuan asing dari Jepang atau yang dikenal dengan ODA mulai masuk di Indonesia sejak tahun 1954 dalam bentuk bantuan kerjasama teknis dengan pengiriman peserta pelatihan untuk menimba ilmu dari pelatihan dibidang kesehatan, komunikasi transportasi, pertanian dan industri. Secara tidak sengaja bantuan ODA telah berkontribusi besar terhadap pengembangan SDM dan pembangunan infrastruktur penunjang sosial ekonomi di Indonesia. Sejak tahun 1954 hingga sekarang, bantuan asing dari pemerintah Jepang telah tersebar ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Jadi, mulai tingkat lokal maupun nasional bantuan asing Jepang sudah dirasakan oleh Indonesia dampaknya terhadap pembangunan. Meskipun Indonesia

mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, namun untuk mempertahankan kestabilan ekonomi tersebut baik jangka menengah maupun jangka panjang, Indonesia dituntut harus bisa mengatasi berbagai masalah kesenjangan ekonomi terutama ketimpangan pendapatan masyarakat didalam negeri.

Pada tahun anggaran 2017 jepang mengeluarkan bantuan hibah grassroots sebesar 6,353 miliar untuk 7 proyek yang tersebar di Indonesia dengan latar belakang isu yang berbeda. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya akan berfokus pada salah satu proyek saja, yaitu ***“The Project for Supporting Fishermen in Belitung Island, Bangka Belitung Province.”*** Proyek hibah akar rumput ini diimplementasikan perkumpulan non profit lokal di Belitung bernama Karya Muda Belitung yang bekerja sama dengan Pemerintah jepang melalui kedutaan besarnya di Indonesia.

KMB merupakan sebuah wadah bagi anak muda yang memiliki rasa peduli tinggi terhadap daerah, semangat belajar dan pengabdian serta bercita-cita untuk mengembalikan generasi muda pulau Belitung yang penuh dengan aura positif. Komunitas ini berdiri pada tanggal 28 Oktober 2014, diawali oleh keprihatinaan terhadap fenomena negatif di kalangan anak muda yang semakin tidak terbendung sehingga membuat Suryandaru selaku Founder dan teman-temannya untuk membuatkan sebuah wadah yang bisa menyalurkan energi anak muda kearah yang lebih positif lewat program pengabdian terhadap daerah. Walaupun Komunitas ini terbilang kecil namun sudah dibuktikan dengan surat keterangan sebagi organisasi resmi yang memiliki badan hukum dan memiliki anggota pengurus yang terstruktur, hal lain juga dibuktikan dengan keikutsertaannya dalam proyek hibah grassroots dari pemerintah Jepang. Pertama kalinya bagi KMB menjalin kerjasama formal dengan pemeritah Jepang lewat kedutaan besar Jepang di Indonesia untuk melakukan kerjasama proyek Hibah *grassroots* dalam menangani masalah keamanan ekonomi yang ada di Belitung.

Komunitas ini dibangun untuk menjadi forum komunikasi dan menghimpun kekuatan generasi muda Belitung yang tersebar di berbagai belahan dunia, tujuannya yaitu untuk menjadi komunitas yang bermanfaat bagi daerah. Kekuatan yang dimaksud adalah karya, prestasi dan pengalaman yang didapat dari perkuliahan, bekerja dan perantauan di level nasional maupun internasional sehingga akumulasi kekuatan ini ditransfer menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan kepulauan Belitung. KMB memiliki visi untuk “menjadi komunitas generasi muda berkekuatan global berkontribusi lokal,” dengan harapan akan tumbuh menjadi komunitas atau kumpulan generasi muda dengan kekuatan (karya, kreativitas, ilmu, skill, kepedulian, prestasi, bisnis, dll) serta memiliki misi yaitu “sebagai forum jaringan komunikasi antar anak muda Belitung yang tersebar di banyak Negara (KMB-Network),” “sebagai forum diskusi dalam menghasilkan gagasan-gagasan strategis bagi perkembangan dan kemajuan pulau Belitung (KMB-Strategy),” “melaksanakan kelas inspirasi, seminar, workshop, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan yang mendorong kesadaran tentang pentingnya pembangunan kualitas SDM anak muda yang merupakan aset masa depan Belitung (KMB-Education)” (Karya Muda Belitung, 2018).

Kerjasama antara pemerintah Jepang dan Karya Muda Belitung ini dilatar belakangi oleh isu keamanan manusia. Ketika musim hujan yang sulit diprediksi tiba, masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk harus dihadapkan dengan keadaan yang sulit, mengingat produksi ikan asin dan olahan kering setengah jadi lainnya merupakan sumber pendapatan mereka sehari-hari. Walaupun kondisi cuaca terkadang relatif panas namun intensitas hujan yang dihasilkan cukup tinggi, sehingga secara otomatis hal tersebut sangat mengganggu mata pencaharian mereka. Akibatnya kerugian besar dan ketidakstabilan pendapatan menimpa masyarakat pesisir tersebut, mengingat daerah ini merupakan salah satu sentra ikan asin terbesar di Indonesia. Selain itu pengeringan dengan cara tradisional sebenarnya rawan akan mikrobiologi (*E coli*, *Salmonella sp.*, *Vibrio sp.*) dan kimia (Histamin) akibat

kontaminasi Fisik (pasir, debu, tanah) sehingga kualitas produk ikan asin yang dihasilkan akan mengalami penurunan, padahal hasil tangkapan nelayan Sijuk sangat banyak sekali. Masalah lainnya yaitu permintaan akan produk olahan perikanan sangat tinggi tetapi kapasitas masyarakat dalam mengolah masih rendah atau terbatas. Jumlah produksi akan hasil olahan perikanan itu sendiri rata-rata 20 ton/bulan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar daerah

Oleh karena itu sebuah komunitas anak muda yang peduli dengan daerah bernama Karya Muda Belitung (KMB) berinisiatif untuk memecahkan masalah tersebut dengan memanfaatkan bantuan yang ditawarkan oleh Jepang melalui *Grant Assistance for Grassroots Human Security Project* (GGP) sebagai upaya dalam mengatasi masalah keamanan ekonomi dengan harapan terciptanya industri yang lebih baik. Namun untuk memperoleh bantuan hibah tersebut, jalan yang dilalui KMB tidaklah mudah karena bukan hanya sekedar penyerahan hibah saja, KMB harus menyusun proposal proyek dan bersaing dengan ribuan proposal dari seluruh wilayah Indonesia yang membutuhkan hibah pada tahun 2016. Lalu proses kerjasama ini harus menjalani tahap-tahap yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang serta melewati beberapa aktor pemerintahan dari tingkat daerah sampai tingkat pusat yang memainkan peran penting dalam mendapatkan persetujuan dari Dewan Pertimbangan Jepang.

Hingga pada tahun 2018 proses negosiasi ini membuahkan hasil dengan ditandatanganinya Nota Kerja Sama antara Kedutaan Besar Jepang oleh Duta Besar Jepang, Mr. Masafumi Ishii dan Karya Muda Belitung yang diwakili oleh Ketua Umum, Suryandaru. Walaupun dana hibah sudah diberikan melalui KMB sebagai pelaksana proyek, Kedubes Jepang tetap akan berperan sebagai pengawas atau konsultan sampai proyek tersebut berakhir agar tetap berkelanjutan. Tentunya ini merupakan sejarah baru bagi provinsi Bangka Belitung karena untuk pertama kalinya provinsi ini menerima Hibah Official Development Assistance (ODA) dari pemerintah

Jepang, sebagai dukungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kepada pembangunan ekonomi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Grant Assistance for Grassroots Human Security Project (GGP) dalam mengatasi isu keamanan ekonomi terhadap masyarakat pesisir di kecamatan Sijuk?

C. Kerangka Berpikir

Konsep Bantuan Luar Negeri

Untuk memperkaya landasan teori sebagai kerangka berpikir penulisan skripsi, akan dijelaskan pengertian bantuan luar negeri oleh beberapa pakar. Dalam sistem global yang kontemporer, peran bantuan luar negeri tidak bisa dipisahkan karena terdapat pola kekuatan yang terstruktur. Hal ini juga disampaikan oleh Weisman yang menyatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan sejumlah komponen atau instrument diplomasi yang digunakan sebagai alat pengontrol efektif untuk mempengaruhi tindakan negara lain (Picard & Groelsema, 2008).

Dalam buku “The Political Economy of International Relations” oleh Robert Gilpin yang berargumen bahwa bantuan luar negeri merupakan dana yang diberikan kepada negara berkembang atau miskin secara ekonomi dari negara yang relatif kaya atau perekonomiannya sudah maju (Gilpin & Gilpin, 1987). Namun untuk pengertian yang lebih luas, K.J Holsti dalam bukunya yang berjudul “Politik International: Suatu Kerangka Analisis” menjelaskan bantuan luar negeri adalah transfer dana, barang atau konsultan teknis dari negara pemberi kepada negara penerima sebagai sarana kebijakan luar negeri yang telah dilangsungkan selama berabad-abad dalam

hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005). Selain itu Holsti juga memaparkan empat macam bantuan luar negeri berdasarkan jenisnya, yaitu :

1) Bantuan Teknik

Bantuan Teknik adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk transfer pengetahuan dan keahlian yang dibawa oleh para ahli atau professional dari negara donor ke negara penerima dengan tujuan untuk membantu berbagai proyek pembangunan yang ada di negara penerima.

2) Bantuan militer

Bantuan militer dapat memberikan keuntungan bagi negara donor (pemberi bantuan) seperti penguasaan negara penerima bantuan. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan bagi negara penerima kepada negara donor sehingga negara penerima tidak bisa mengoperasikan kekuatan militernya secara efektif kecuali negara donor memberikan bantuan berupa pelatihan sumber daya militer, pemeliharaan dan suku cadang. Jadi pemberian bantuan militer yang berujung pada pengawasan dalam penggunaan senjata dapat memberikan sebuah jaminan bahwa negara penerima bantuan tidak akan menggunakan kekuatan militernya untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan negara donor terkecuali negara penerima bantuan mampu memperoleh bantuan suku cadang, pelatihan dan amunisi dari sumber-sumber yang lain.

3) Grants/hibah dan program impor komoditi

Sejak tahun 1950an sampai sekarang, metode bantuan dengan menghibahkan modal dan barang adalah yang paling banyak diminati karena bantuan seperti ini tidak mengharuskan pembayaran balik layaknya hutang yang harus dikembalikan. Namun, pemberian bantuan ini juga berpotensi menimbulkan masalah antara negara donor dan negara penerima karena pemerintah negara donor bisa saja

menggantikannya menjadi pinjaman jangka panjang dengan kepentingan tertentu. Biasanya sasaran dari bantuan ini adalah negara yang sedang mengalami keadaan darurat, seperti kelaparan, kemiskinan, ancaman militer, wabah penyakit atau bencana alam.

4) Pinjaman untuk pembangunan

Negara donor memberikan pinjaman dana dalam jangka pendek kepada negara penerima dengan catatan negara penerima harus membayar kembali pinjaman tersebut yang disertai bunga, namun sayangnya sifat bantuan ini hanya sementara. Pinjaman dana ini dapat dikategorikan sebagai bantuan apabila dana yang dipinjamkan oleh negara donor kepada negara penerima dalam ranah bilateral dan multilateral memiliki jumlah bunga yang lebih rendah dari pasar keuangan internasional.

Lebih lanjut Holsti dalam (Perwita & Yani, 2005) menjelaskan bahwa salah satu bentuk bantuan luar negeri berupa hibah yang terdapat beberapa parameter dalam pemberiannya, parameter tersebut digolongkan menjadi:

1) Hibah Menurut Skema Dan Bentuknya

a) *Cash Grant*

Hibah ini berbentuk tunai yang terbatas untuk negara-negara miskin. Skema hibah tersebut biasanya melalui penunjukkan bukti impor atas komoditas yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kesepakatan negara donor

b) *Grants assistance for project*

Hibah dalam bentuk pemberian dana yang dapat dikatakan sama dengan pinjaman luar negeri namun digunakan untuk membiayai suatu proyek pengadaan barang dan jasa (Project Assistance) hanya saja dana dalam skema ini tidak harus dikembalikan.

c) *Technical assistance or technical cooperation*

Hibah ini berupa penyediaan tenaga ahli atau konsultan dari negara donor untuk membantu proyek pembangunan di negara penerima. Dalam hal ini, negara penerima hanya memfasilitasi kegiatan tenaga-tenaga ahli dan konsultan tersebut serta memberikan hasil penilaian dan pemantauan dari kinerjanya. Semua pembiayaan tenaga ahli ditanggung oleh pihak negara pendonor. Negara penerima hibah hanya menyediakan hal hal umum seperti pendampingan, tempat dan kendaraan untuk para ahli agar bekerja dengan baik. Selain itu, hibah ini juga diberikan dalam bentuk program beasiswa bagi sumber daya manusia di negara penerima untuk belajar di negara pendonor

d) *Grants for humanitarian assistance*

Pemberian hibah ini dilakukan bila terjadi keadaan bantuan darurat yang mengancam. Beberapa contoh diantaranya seperti pemberian bantuan bahan esensial yang sangat diperlukan seperti sandang pangan, obat-obatan dan uang tunai.

2) Hibah menurut peruntukannya dan penyalurannya:

- a) Hibah untuk pemerintah (government to government)
Pemerintah negara pendonor memberikan hibah kepada pemerintah negara penerima untuk proyek-proyek pemerintah yang umumnya dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau lembaga bentukan (semi) pemerintah.
- b) Hibah untuk non-pemerintah (government to private)
Pemerintah negara pendonor memberikan hibah kepada lembaga-lembaga non pemerintah. Misalnya alokasi hibah dalam lembaga lembaga non-pemerintah (LSM, NGO, CBO dan asosisasi non profit lainnya) sebagai bagian dari skema pemberian *Official Development Assistance* (ODA) dari negara donor kepada negara penerima yang dapat juga digolongkan sebagai bagian dari pledge CGI. Hibah ini dikelola atau ditangani langsung oleh negara

pendonor sedangkan pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga atau organisasi non profit yang ada di negara penerima.

Menurut K.J holsti, program-program yang tersedia dalam bantuan luar negeri dapat memberikan manfaat bersama antara negara donor dan negara penerima. Satu sisi negara penerima bantuan berharap dengan adanya bantuan dari negara donor dapat menciptakan stabilitas politik dan membawa perekonomian negara penerima ke arah yang lebih modern serta memperoleh keamanan militer. Sedangkan di sisi yang lain negara donor tanpa biasanya juga berharap untuk menerima komersial atau dividen politik dengan segera atau dalam jangka panjang melalui “syarat-syarat” yang mereka sertakan pada bantuan luar negeri mereka (Holsti, 1992, pp. 321-328). Jan P. Pronk pernah mengatakan bahwa bantuan luar negeri dapat menjadi katalis maupun penghambat terhadap pembangunan disuatu negara, sehingga pada dasarnya peningkatan pembangunan sosial dan infrastruktur dinilai dapat merangsang produktivitas di bidang ekonomi yang dapat memicu pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil (Chakravati, 2005).

Salah satu negara maju yang memiliki program bantuan luar negaranya adalah Jepang. Jepang mengaplikasikan program bantuan luar negerinya melalui Bantuan Pembangunan Resmi / *Official Development Assistance* (ODA). Pada dasarnya *Official Development Assistance* (ODA) yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang diberikan melalui tiga jenis bantuan, yaitu berupa pinjaman YEN, bantuan hibah dan kerjasama teknik. Sementara yang menjadi fokus utama dalam penulisan skripsi ini adalah salah satu turunan dari Bantuan Hibah Umum yaitu *Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects*. Ini merupakan skema bantuan dengan ciri utamanya langsung dan menjangkau sasaran penerima di tingkat akar rumput. Adapun lembaga yang berhak menerima bantuan ini antara lain adalah sekolah, rumah sakit dan lembaga non profit (NGO, LSM, CBO dan asosiasi non profit lainnya). Bantuan ini diberikan oleh

pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besarnya untuk mendanai proyek usulan lembaga penerima dalam melaksanakan proyek pembangunan di tingkat akar rumput. Tingkat akar rumput yang dimaksud dalam hal ini adalah lebih mengacu kepada masyarakat kalangan bawah di daerah-daerah pelosok yang mengalami masalah keamanan manusia. Oleh sebab itu, skema bantuan ini dinamakan dengan *Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects* (GGP).

Dalam penelitian ini, jenis bantuan yang diberikan oleh Kedubes Jepang untuk masyarakat pesisir di Belitung adalah *Grant Assistance for Grassroots Human Security Project* (GGP). Kedubes Jepang memberikan bantuan hibah pendanaan kepada proyek usulan Karya Muda Belitung untuk membantu masyarakat pesisir yang menjadi produsen olahan kering untuk dapat keluar dari keterpurukan ekonomi akibat sistem produksi yang masih tradisional dengan bergantung pada cuaca sehingga mereka mengalami ketidakstabilan pendapatan dari hasil pemasaran bahkan pernah mencapai titik kerugian yang paling besar. Karya Muda Belitung menjadi mitra lokal Kedubes Jepang untuk mengimplementasikan bantuan hibah, sedangkan Kedubes Jepang berperan sebagai konsultan dan pengawas pelaksanaan proyek agar yang sudah diberikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perjanjian awal.

Dalam proses pemberian dana, Kedutaan Jepang atau Konsulatnya menerima formulir aplikasi dan dokumen sebagai bentuk proposal pengajuan proyek dari Karya Muda Belitung, setelah itu Kedutaan atau Konsulatnya akan melakukan langkah-langkah untuk menyeleksi proyek-proyek yang dianggap layak untuk bisa mendapatkan dana hibah dengan melewati pengujian dan evaluasi terperinci oleh Pemerinatah Jepang. Kedubes Jepang menyalurkan dana hibah kepada Karya Muda Belitung sebagai mitra kerjasama untuk mengimplementasikan bantuan tersebut. Tujuan proyek ini adalah untuk mengatasi masalah keamanan ekonomi pada masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai produsen ikan asin dan produk olahan lainnya di kecamatan Sijuk akibat

dari sistem produksi yang masih tradisional dengan bergantung pada cuaca sehingga mereka mengalami ketidakstabilan pendapatan dari hasil pemasaran bahkan pernah mencapai titik kerugian yang paling besar.

Bantuan Hibah Grassroots untuk keamanan Manusia merupakan suatu skema yang ditawarkan pemerintah Jepang melalui kedutaan besarnya di negara berkembang termasuk Indonesia dengan harapan untuk membantu masyarakat secara langsung yang memanfaatkan pengetahuan dari organisasi nirlaba seperti NGO dan organisasi berbasis komunitas lokal lainnya yang melakukan kegiatan pada tingkat akar rumput. Kedubes Jepang menyalurkan bantuan hibah sebesar Rp 717,000,000,- kepada Karya Muda Belitung untuk pengadaan mesin pengering ikan (food drying machine) bagi masyarakat pesisir Kecamatan Sijuk di Pulau Belitung. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, namun untuk mempertahankan kestabilan ekonomi tersebut baik jangka menengah maupun jangka panjang, Indonesia dituntut harus bisa mengatasi berbagai masalah kesenjangan ekonomi dan ketimpangan pendapatan didalam negeri.

D. Hipotesa

Implementasi *Grant Assistance for Grassroots Human Security Project* (GGP) dalam mengalami isu keamanan ekonomi terhadap masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk, yaitu:

Pemerintah Jepang memberikan bantuan luar negeri dalam bentuk hibah pendanaan dengan skema *Grant Assistance for Project* yang disalurkan oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia kepada sektor private (Karya Muda Belitung) sebagai mitra lokal untuk mengimplementasikan proyek usulannya dalam mengatasi masalah keamanan ekonomi pada masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.

E. Metodologi Penelitian

Sepanjang penulisan skripsi, penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu data penelitian yang tidak hanya disajikan dalam bentuk angka-angka, namun juga metode penelitian yang bersifat deduktif. Deduktif berarti pemaparan dari hal yang umum kemudian terfokus kedalam hal yang khusus. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan alasan penulis ingin menelusuri lebih dalam mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Kedubes Jepang dengan Karya muda Belitung serta implementasi dari kerjasama ini terkait penanggulangan isu keamanan ekonomi pada masyarakat pesisir kecamatan sijuk di pulau Belitung.

Ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder, seperti yang dijelaskan dibawah ini :

- 1) Data primer yang dimaksud adalah penulis memperoleh data melalui wawancara, rekaman video pidato dan pengamatan langsung di lapangan. Jenis Wawancara yang digunakan adalah semiterstruktur yaitu sifat wawancara lebih terbuka dan informan atau narasumber dimintai ide atau pendapatnya mengenai permasalahan. Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan dan mencatat informasi yang diberikan oleh narasumber dengan teliti yang didukung oleh alat bantu seperti perekam suara, brosur, kamera digital dan sebagainya. Sedangkan rekaman video yang dimaksud adalah pidato-pidato sambutan dalam acara ceremonial pemberian hibah di Sijuk oleh beberapa informan yang terlibat dalam proyek tersebut. Narasumber atau informan dalam wawancara dan video sambutan yang dimintai informasinya yaitu perwakilan Kedubes Jepang, ketua umum Karya Muda Belitung dan pengurusnya, kelompok nelayan, kelompok masyarakat pemanfaat Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) serta pemerintah desa setempat.

- 2) Data sekunder yang diperoleh penulis yaitu melalui kajian pustaka seperti jurnal, berita, koran, majalah, dokumen resmi, buku cetak, e-book dan website.

F. Jangkauan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai jangkauan penelitian yang dibatasi waktu pada tahun 2016–2018, dari tahap awal kerjasama, tahap implementasi sampai ke tahap hasil dari kerjasama yang telah dibangun. Penelitian ini juga akan dibatasi dengan isu keamanan ekonomi terhadap masyarakat pesisir Kecamatan Sijuk di Belitung dan akan disertakan proses kerjasama yang terjalin antara Kedubes Jepang dan *grassroots* Karya Muda Belitung (KMB) sampai ke tahap pelaksanaan atau implementasi dari Hibah *Grassroots* yang diberikan oleh Kedubes Jepang. Penulis akan mengambil studi pustaka di daerah kecamatan Sijuk, Belitung dengan pertimbangan bahwa Belitung merupakan tempat tinggal penulis dan penulis merupakan relawan KMB untuk membantu melaksanakan proyek hibah *grassroots* bagi masyarakat pesisir kecamatan Sijuk sehingga dalam pengambilan data secara primer lebih efektif dan efisien.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini yang menjadi dasar penulisan skripsi yang mencakup Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Berpikir, Hipotesis, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II: Keamanan Manusia Sebagai Isu Global dan Kontribusi Jepang dalam Mengatasinya

Bab ini berisi tentang awal mula kemunculan isu keamanan non tradisional seperti kemanan manusia dalam dunia internasional dan elaborasi keamanan ekonomi sebagai salah satu dari tujuh dimensinya yang berperan sebagai isu penting bagi kehidupan sosial ekonomi di negara-negara berkembang. Bab ini juga akan membahas peran *Official Deveopment Assistance* (ODA) yang menghasilkan *Grant Assistance for Grassroots Human Security Project* (GGP) dan beberapa proyeknya di berbagai negara berkembang.

BAB III: Peran dan Implementasi GGP di Indonesia

Bab ini akan berisi penjelasan tentang *Grant Assistance for Grassroots Human Security Project* (GGP) di Indonesia dan beberapa proyeknya di Indonesia pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Jepang.

BAB IV: Kerjasama Kedubes Jepang dan Karya Muda Belitung dalam mengatasi isu keamanan ekonomi pada masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk

Bab ini akan menjelaskan bagaimana kerjasama dan implementasi bantuan hibah dari Karya Muda Belitung sebagai mitra Kedubes Jepang melalui skema GGP serta dampaknya dalam mengatasi isu keamanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.

BAB V: Kesimpulan dan Penutup